

RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Renja Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025.

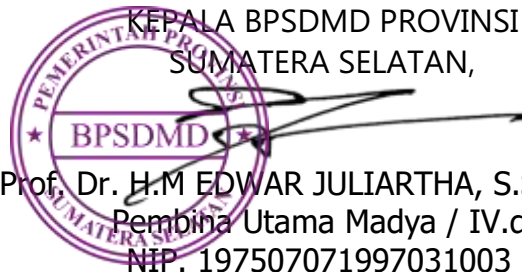
Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen resmi yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan Pembangunan tahunan daerah pada umumnya.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 ini mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 dan Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026, yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan dan sasaran serta indikator kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 ini.

Palembang, 11 Juni 2024

KEPALA BPSDMD PROVINSI
SUMATERA SELATAN,



Prof. Dr. H.M EDWAR JULIARTHA, S.Sos, MM
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 197507071997031003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	7
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	14
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	16
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	16
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	17
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	21
BAB IV PENUTUP	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Otonomi Daerah yang dilaksanakan kepada Daerah Kabupaten/Kota merupakan tantangan baru bagi Kabupaten/Kota untuk dapat menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) aparat yang profesional dan berkemampuan untuk menjawab pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai lembaga hulu memiliki dasar strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) aparat yang profesional dan berkemampuan, Tugas dan fungsi dalam rangka paparan SDM Aparat yang profesional dan berkemampuan adalah melaksanakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) bagi aparatur, baik Diklat Teknis, Fungsional, Kepemimpinan maupun Diklat Pemerintahan dan Politik serta Diklat Substansi lainnya, upaya perbaikan dan peningkatan kondisi Diklat melalui penyempurnaan unsur-unsur diklat (desain program; kurikulum/silabi, metode, sarana/ prasarana, Widyaiswara/ Narasumber) terus dilaksanakan.

Untuk terwujudnya pelaksanaan Tupoksi yang terarah, sistimatis dan pencapaian kinerja yang optimal, BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun dokumen perencanaan 2024-2026 yang mengacu kepada kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024-2026 yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumsel Tahun 2024-2026.

Secara bertahap dan memberlakukan skala prioritas, Renstra yang didalamnya mencakup Visi, Misi, tujuan, sasaran, kelayakan dan program dalam bidang kediklatan akan terus direalisasikan secara berdaya guna dan berhasil guna mencapai kinerja organisasi yang optimal.

Untuk merealisasikan secara berdaya guna dan berhasil guna, Visi, Misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program, maka disusunlah Rencana kerja Perangkat Daerah dalam bentuk usulan program/ kegiatan tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Kewajiban Perangkat Daerah untuk menyusun Renja sebagai dasar dan acuan penyusunan RAPBD diamanatkan melalui beberapa peraturan perundangan, antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- e. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- f. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2019-2023.
- g. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah umumnya.

Adapun maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai penjabaran visi, misi dan tupoksi serta untuk mengakomodir usulan program/kegiatan multistakeholder Perangkat Daerah guna masukan bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2025.

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah tersusunnya dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yaitu tahun 2025 yang selaras dengan tupoksi dan Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Pokok-pokok bahasan yang terdapat dalam Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan secara garis besar terdiri dari :

Bab I Pendahuluan

Berisikan tentang pengertian ringkas Renja, proses penyusunan Renja, penjelasan tentang landasan hukum serta maksud dan tujuan dari penyusunan Renja.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu.

Berisikan kajian review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (2023) dan perkiraan capaian tahun 2024, capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja serta isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berisikan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang menyangkut arah dan kebijakan pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD dan Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan.

Bab V Penutup

Berisikan uraian penutup, yaitu catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan pelaksanaan serta kaídah pelaksanaan dan rencana tidak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN
RENJA BPSDMD PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pencapaian Program Tahun lalu (2023) dan Perkiraan tahun berjalan (2024).

Hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan APBD dan BLUD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Bulan Desember pada BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut :

Hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Provinsi Sumatera Selatan TA 2023 sampai dengan Triwulan IV pada OPD BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut :

a. Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan BPSDMD Prov. Sumsel berdasarkan jenis belanja (APBD+BLUD)

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi		
			Keuangan (Rp.)	%	Fisik (%)
1	Belanja Operasi	32.701.329.482	28.436.049.272	86,96	100
	• Belanja Pegawai	13.998.260.000	13.272.764.575	94,82	100
	• Belanja Barang dan Jasa	18.703.069.482	15.163.284.697	81,07	100
2	Belanja Modal	3.607.530.200	2.892.988.725	80,19	100
	• Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.495.270.000	1.493.537.475	99,88	100
	• Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.022.268.200	1.310.201.700	64,79	100
	• Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	90.000.000	89.249.550	99,17	100
	TOTAL	36.308.867.682	31.329.037.997	86,28	100

b. Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Sumber Dana

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi		
			Keuangan (Rp.)	%	Fisik (%)
Sumber Dana APBD		24.889.993.000	22.351.973.453	89,80	100
1	Belanja Operasi	21.582.454.800	19.757.962.203	91,55	100
	• Belanja Pegawai	13.998.260.000	13.272.764.575	94,82	100
	• Belanja Barang dan Jasa	7.584.194.800	6.485.197.628	85,51	100
2	Belanja Modal	3.307.538.200	2.594.011.250	78,43	100
	• Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.195.270.000	1.194.560.000	99,94	100
	• Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.022.268.200	1.310.201.700	64,79	100
	• Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	90.000.000	89.249.550	99,17	100
Sumber Dana BLUD		11.418.874.682	8.977.065.544	78,62	100
	Belanja Operasi	11.118.874.682	8.678.087.069	78,05	100
	• Belanja Barang dan Jasa	11.118.874.682	8.678.087.069	78,05	100
	Belanja Modal	300.000.000	298.977.475	99,66	100
	• Belanja Modal Peralatan dan Mesin	300.000.000	298.977.475	99,66	100
TOTAL		36.308.867.682	31.329.037.997	86,28	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada tahun 2023 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Selatan secara total telah menyelenggarakan 24 jenis Kegiatan diklat, meliputi pelatihan struktural/manajerial, Pelatihan Teknis dan Sertifikasi seperti pada tabel dibawah ini.

**Tabel
Kegiatan Pengembangan Kompetensi Tahun 2023**

NO	NAMA PELATIHAN / BIDANG DIKLAT	JUMLAH PESERTA		SUMBER DANA
	BIDANG MANAJERIAL			
1	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	109	Orang	BLUD
2	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	78	Orang	BLUD
	sub total	187	Orang	
	BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI			
1	Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Level 1	40	Orang	APBD
2	Pelatihan Management of Training (MOT)	19	Orang	APBD
3	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Pelatihan	30	Orang	APBD
4	Pelatihan Coaching dan Mentoring	30	Orang	APBD
5	Asesment Center	464	Orang	BLUD
6	Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1	199	Orang	BLUD
7	Pelatihan Pejabat Pembuat komitmen (PPK) tipe C	21	Orang	BLUD
8	Uji Kompetensi Polisi Pamong Praja	123	Orang	BLUD
	sub total	926	Orang	
	BIDANG TEKNIS UMUM FUNGSIONAL			
1	Diklat Fungsional Tenaga Perawat Kesehatan	30	Orang	APBD
2	Diklat fungsional Bidan	30	Orang	APBD
3	Diklat Fungsional Pustakawan	40	Orang	APBD
4	Diklat fungsional Arsiparis	30	Orang	APBD
5	Diklat Tenaga Perpustakaan Sekolah	40	Orang	BLUD
6	Diklat Fungsional Arsiparis	28	Orang	BLUD
	sub total	198	Orang	

NO	NAMA PELATIHAN / BIDANG DIKLAT	JUMLAH PESERTA		SUMBER DANA
	BIDANG TEKNIS INTI			
1	Diklat Peningkatan Kapasitas Camat	40	Orang	APBD
2	Diklat Peningkatan Kapasitas lurah	40	Orang	APBD
3	Diklat Pemberantasan Korupsi	40	Orang	APBD
4	Diklat Bendahara keuangan daerah	40	Orang	APBD
5	Diklat Peningkatan Kapasitas Kades	173	Orang	BLUD
6	Diklat Dasar Polisi Pamong Praja	47	Orang	BLUD
7	Diklat Peningkatan Kapasitas Lurah	34	Orang	BLUD
	sub total	414	Orang	
	TOTAL	1.727	ORANG	APBD dan BLUD

Capaian kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada masing-masing bidang dapat diuraikan sebagai berikut :

2.2.1 Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial

Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial pada tahun 2023 telah melaksanakan 2 kegiatan kediklatan yaitu Pelatihan Kepemimpinan Administrator sebanyak 3 angkatan dengan jumlah peserta 109 orang, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 2 angkatan dengan jumlah peserta 78 orang, seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel
Kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial

No	Kegiatan/Diklat	Jumlah Peserta			Sumber Dana
		Target	Realisasi	%	
1	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	109 orang	109 orang	100	BLUD
2	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	78 orang	78 orang	100	BLUD
	Total	187 orang	187 orang	100	

2.2.2 Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan

Bidang sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan pada tahun 2023 menyelenggarakan 8 kegiatan yang terdiri dari Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Level 1 dengan jumlah 40 orang, Pelatihan Management of Training (MOT) dengan jumlah 19 orang, Pelatihan Penyusunan Kurikulum dengan jumlah 30 orang, Pelatihan Coaching dan Mentoring dengan jumlah 30 orang, pelaksanaan Asesment Center dengan jumlah 464 orang, pelatihan dan pelaksanaan uji kompetensi pengadaan barang jasa/pemerintah dengan jumlah 199 orang, Pelatihan Pejabat Pembuat komitmen (PPK) tipe C dengan jumlah 21 orang, dan Uji Kompetensi Polisi Pamong Praja dengan jumlah 123 orang, seperti dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel
Kegiatan Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan

No	Kegiatan/Diklat	Jumlah Peserta			Sumber
		Target	Realisasi	%	Dana
1	Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Level 1	40 orang	40 orang	100	APBD
2	Pelatihan Management of Training (MOT)	19 orang	19 orang	100	APBD
3	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Pelatihan	30 orang	30 orang	100	APBD
4	Pelatihan Coaching dan Mentoring	30 orang	30 orang	100	APBD
5	Asesment Center	464 orang	464 orang	100	BLUD
6	Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1	199 orang	199 orang	100	BLUD
7	Pelatihan Pejabat Pembuat komitmen (PPK) tipe C	21 orang	21 orang	100	BLUD
8	Uji Kompetensi Polisi Pamong Praja	123 Orang	123 orang	100	BLUD
	Total	926 Orang	926 orang	100	

2.2.3 Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional

Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional pada tahun 2023 menyelenggarakan 7 kegiatan yaitu Diklat Fungsional Tenaga Perawat Kesehatan, Diklat fungsional Bidan, Diklat Fungsional Pustakawan, Diklat fungsional Arsiparis, Diklat Tenaga Perpustakaan Sekolah, Diklat Fungsional Arsiparis dengan total keseluruhan peserta berjumlah 198 orang, seperti dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel
Kegiatan Pengembangan Kompetensi teknis Umum dan Fungsional

No	Kegiatan/Diklat	Jumlah Peserta			Sumber dana
		Target	Realisasi	%	
1	Diklat Fungsional Tenaga Perawat Kesehatan	30 orang	30 orang	100	APBD
2	Diklat fungsional Bidan	30 orang	30 orang	100	APBD
3	Diklat Fungsional Pustakawan	40 orang	40 orang	100	APBD
4	Diklat Fungsional Arsiparis	30 orang	30 orang	100	APBD
5	Diklat Tenaga Perpustakaan Sekolah	40 orang	40 orang	100	BLUD
6	Diklat Fungsional Arsiparis	28 orang	28 orng	100	BLUD
	TOTAL	198 orang	198 orang	100	APBD + BLUD

2.2.4 Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti

Bidang pengembangan kompetensi teknis inti pada tahun 2023 menyelenggarakan 7 Jenis kegiatan kediklatan yaitu Diklat Peningkatan Kapasitas Camat, Diklat Peningkatan Kapasitas lurah, Diklat Pemberantasan Korupsi, Diklat Bendahara keuangan daerah, Diklat Peningkatan Kapasitas Kades, Diklat Dasar Polisi Pamong Praja, Diklat peningkatan kapasitas Lurah dengan jumlah keseluruhan peserta berjumlah 414 orang, seperti dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel
Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Inti

No	Kegiatan/Diklat	Jumlah Peserta			Sumber Dana
		Target	Realisasi	%	
1	Diklat Peningkatan Kapasitas Camat	40 orang	40 orang	100	APBD
2	Diklat Peningkatan Kapasitas lurah	40 orang	40 orang	100	APBD
3	Diklat Pemberantasan Korupsi	40 orang	40 orang	100	APBD
4	Diklat Bendahara keuangan daerah	40 orang	40 orang	100	APBD
5	Diklat Peningkatan Kapasitas Kades	173 orang	173 orang	100	BLUD
6	Diklat Dasar Polisi Pamong Praja	47 orang	47 orang	100	BLUD
7	Diklat peningkatan kapasitas Lurah	34 orang	34 orang	100	BLUD
	Total	414 orang	414 orang	100	APBD + BLUD

Untuk Indikator kinerja OPD yang tercantum dalam Target capaian RPJMD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026, yaitu ada dua indikator yang merupakan target kumulatif dari tahun sebelumnya, dan untuk tahun 2023 realisasi target capaian RPJMD BPSDMD Prov. Sumsel yaitu sebagai berikut:

1. Untuk indikator pertama yaitu Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial, dari target 90% terealisasi sebesar 91% sehingga capaiannya mencapai 101%. Hal ini dikarenakan adanya kegiatan diklat dengan menggunakan sumber dana APBD dan BLUD.
2. Untuk indikator kedua yaitu Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis dan fungsional, dari target 75% terealisasi sebesar 77,7% sehingga capaiannya mencapai 103,6%. Hal ini juga dikarenakan adanya kegiatan diklat dengan menggunakan sumber dana APBD dan BLUD.

Tabel Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi	Sumber Dana
1	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial	Persen	90%	91%	APBD dan BLUD
2	Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis dan fungsional, kompetensi sosio cultural dan kompetensi pemerintah	Persen	75%	77,7%	APBD dan BLUD

Tabel
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024(thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial	-	-	87%	88%	90%	92%	90%	96%	90%	92%	
2	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis dan fungsional, kompetensi sosio, cultural dan kompetensi pemerintahan	-	-	55%	65%	75%	80%	55%	65,6%	75%	85%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bahwa setiap PNS wajib untuk mengembangkan kompetensinya selama 20 Jam Pelajaran per tahun. Pengembangan Kompetensi tersebut dapat dilaksanakan melalui Pendidikan dan Pelatihan, seminar, kursus, penataran, praktik kerja di instansi lain serta pertukaran antara pegawai negeri sipil dengan pegawai swasta. Oleh karena itu, BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan mempunyai posisi dan peran yang penting dalam meningkatkan kompetensi pegawai.

BPSDMD harus mampu mewujudkan tiga kompetensi pegawai yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, yaitu teknis, manajerial dan sosial kultural. Indikator tiap kompetensi secara jelas dijabarkan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Kompetensi teknis, misalnya, diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman kerja secara teknis. Sedangkan kompetensi manajerial diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan. Terakhir, kompetensi sosial kultural diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

Tantangan yang dihadapi oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka pengembangan pemberian pelayanan dalam rangka pengembangan kompetensi antara lain :

a. Perlunya pengembangan sistem informasi kediklatan

Seiring perkembangan teknologi informasi, maka penggunaan teknologi sistem informasi terutama yang berbasis *web* atau *online* menjadi tantangan tersendiri bagi BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan, sehingga mulai Tahun 2019 BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan akan mengembangkan aplikasi sistem informasi kediklatan berbasis *web* yang nantinya akan terus dikembangkan untuk

menjawab tantangan pelaksanaan pelatihan dengan menggunakan *e-learning*.

b. Akreditasi dan Sertifikasi Diklat

Akreditasi dan sertifikasi diklat dari instansi Pembina diklat adalah hal yang wajib sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelatihan Teknis, Fungsional, Sosiokultural dan Pelatihan Kepemimpinan dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan terakreditasi.

c. Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan pengembangan kompetensi.

Mengingat tingginya kebutuhan untuk pengembangan kompetensi ASN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang mengamanatkan setiap PNS harus mengembangkan kompetensinya minimal 20 Jam Pelajaran/orang/tahun sehingga anggaran yang diperlukan tidak sedikit.

d. Masih Adanya Ego Sektoral dalam Penyelenggaraan Diklat

Penyelenggaraan diklat melibatkan beberapa komponen pokok yaitu adanya sarana dan prasarana, program, penyelenggara dan pengajar serta dukungan dana. Di lingkungan Provinsi dan Kab/Kota masih banyak Perangkat Daerah yang belum memenuhi hal tersebut, namun tetap untuk memaksakan diri untuk melaksanakan penyelenggaraan Diklat, yang mengakibatkan mutu, tujuan dan sasaran Diklat tidak tercapai sesuai yang diharapkan.

e. Kurangnya Tenaga Pengajar Bidang Teknis Fungsional

Terbatasnya tenaga pengajar/pengampu mata diklat pada Bidang Teknis Fungsional karena substansi materi yang sangat teknis.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025, BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penyusunan Rancangan awal renja BPSDMD Prov. Sumsel harus mengacu kepada RPJMD dan Renstra BPSDMD Prov. Sumsel
- b. Penyusunan Rancangan awal mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan terkait seperti Permendagri 86 tahun 2017, Permendagri 90 tahun 2019.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- a. Usulan Pelaksanaan diklat di Kabupaten/Kota disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan kemampuan masing-masing yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- b. Usulan kegiatan diklat yang berasal dari Kabupaten/Kota akan diakomodir melalui mekanisme Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
- c. Usulan Diklat tahun 2023 disesuaikan dengan kebutuhan instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang telah diakomodir melalui Rapat Teknis OPD, yang nantinya akan dialokasikan pada anggaran BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Penetapan tujuan BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan mengacu pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dari Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan terpilih.

BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan tupoksinya mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur, untuk itu BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan harus dapat mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih yaitu Tujuan ke-4 yaitu **Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan** dan sasaran ke-11 yaitu **Maju Aparatur yang Profesional dan Berintegritas** (melalui meningkatnya profesionalisme dan integritas aparatur pemerintah daerah).

Guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut, BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan menetapkan 2 tujuan yaitu Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang kompeten dan Mewujudkan Pengelolaan Kelembagaan Diklat yang sesuai dengan standar.

Untuk mewujudkan Tujuan Sumber Daya Aparatur yang kompeten tersebut, dapat dilaksanakan melalui 2 (dua) Sasaran yaitu Meningkatkan Kompetensi Manajerial Aparatur, dan Meningkatkan Kompetensi Teknis Fungsional, Kompetensi Sosio-Cultural dan Kompetensi Pemerintahan ASN.

Dalam upaya mencapai Sasaran untuk meningkatkan kompetensi manajerial bagi ASN, BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan melaksanakannya melalui pendidikan dan pelatihan manajerial/struktural bagi pejabat ASN baik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maupun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan dalam upaya mencapai sasaran untuk Meningkatkan Kompetensi Teknis Fungsional, Kompetensi Sosio Cultural dan Kompetensi Pemerintahan ASN dilaksanakan melalui upaya pengembangan kompetensi teknis dan fungsional, kompetensi sosio cultural dan kompetensi pemerintahan. Ketiga kompetensi tersebut sebagai salah

satu syarat untuk pengangkatan dalam jabatan-jabatan tertentu, sehingga upaya pengembangannya dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Aparatur yang Profesional dan Berintegritas sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel Terpilih.

Tujuan BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan kedua yaitu mewujudkan pengelolaan kelembagaan diklat yang sesuai dengan standar. Untuk mewujudkan Tujuan yang kedua ini akan dilaksanakan melalui Sasaran-Sasaran berikut yaitu meningkatkan kualitas tenaga kediklatan, meningkatkan jumlah diklat yang terakreditasi serta meningkatkan sarana dan prasarana kediklatan, dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat.

Agar Tujuan dan Sasaran tersebut dapat dicapai maka tentu diperlukan penentuan target per tahun selama 5 (lima) tahun ke depan. Penentuan target ditetapkan dengan mempertimbangkan persentase dalam skala 0-100%. Angka tersebut antara lain didapat dengan persentase jumlah Jabatan yang ada dan dikurangi dengan alumni Pejabat ASN yang telah mengikuti diklat dalam jabatan tersebut. Tabel berikut menggambarkan Tujuan dan Sasaran beserta targetnya selama 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang kompeten	Meningkatkan kompetensi manajerial Aparatur	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial / struktural	92%	93%	94%
		Meningkatkan kompetensi teknis fungsional, kompetensi sosio cultural dan kompetensi pemerintahan ASN	Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis dan fungsional, kompetensi sosio cultural dan kompetensi pemerintahan	80%	85%	90%
2	Meningkatnya Kualitas Lembaga Pelatihan	Meningkatkan pengelolaan program pelatihan yang sesuai dengan standar	Persentase peningkatan program pelatihan yang terakreditasi	15%	15%	15%

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPD
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial		92%	93%	94%	94%
2	Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis dan fungsional, kompetensi sosio cultural dan kompetensi pemerintahan		80%	85%	90%	90%
3	Persentase Peningkatan Program Pelatihan yang terakreditasi		15%	15%	15%	15%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung visi dan misi Gubernur terutama didalam Misi Ketiga yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional dan responsif dan sasaran ke-11 yaitu Maju Aparatur yang profesional dan Berintegritas, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan berbagai program/kegiatan untuk meningkatkan atau mengembangkan kompetensi aparatur baik kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan fungsional serta kompetensi sosiokultural.

Pada tahun 2025, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan mengusulkan 2 (dua) program, 5 kegiatan dan 32 Subkegiatan, dengan total pagu usulan sebesar Rp. 39.212.854.950,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program Kegiatan Dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Nomor	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 050-3708)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
I.	05.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Palembang	100%	25.431.427.424	
1.	5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Palembang	100%	320.000.000	PAD
1)	5.04.01.1.01.01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palembang	1 dokumen	100.000.000	PAD
2)	5.04.01.1.01.02	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Palembang	1 dokumen	25.000.000	PAD
3)	5.04.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Palembang	1 dokumen	25.000.000	PAD
4)	5.04.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Palembang	1 dokumen	50.000.000	PAD
5)	5.04.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengembangan SDM Aparatur)	Palembang	1 laporan	120.000.000	PAD

Nomor	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 050-3708)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
2.	5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pelaksanaan administrasi keuangan	Palembang	100%	14.891.676.000	PAD
6)	5.04.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Palembang	80 orang	14.731.136.000	DAU
7)	5.04.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Palembang	12 dokumen	160.540.000	PAD
3.	5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Palembang	100%	249.800.000	PAD
8)	5.04.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Palembang	2 paket	149.800.000	PAD
8)	5.04.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Palembang	5 orang	100.000.000	PAD
4.	5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Palembang	100%	947.500.000	PAD
9)	5.04.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Palembang	1 paket	150.000.000	PAD
10)	5.04.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Palembang	1 paket	105.000.000	PAD
11)	5.04.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Palembang	2 paket	80.000.000	PAD

Nomor	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 050-3708)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
12)	5.04.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Palembang	4 dokumen	17.500.000	PAD
13)	5.04.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Palembang	4 laporan	65.000.000	PAD
14)	5.04.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Palembang	20 Laporan	410.000.000	PAD
15)	5.04.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Palembang	1 dokumen	120.000.000	PAD
5.	5.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	Palembang	100%	3.261.644.000	PAD
16)	5.04.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Palembang	3 unit Roda 4, 2 unit roda dua	1.618.000.000	PAD
	5.04.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Palembang	1 unit	481.000.000	
17)	5.04.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Palembang	1 paket	200.000.000	
18)	5.04.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Palembang	50 unit	762.644.000	
	5.04.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Disediakan	Palembang	10 unit	200.000.000	

Nomor	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 050-3708)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
5.	5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Palembang	100%	3.589.520.424	PAD
20)	5.04.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palembang	1 laporan	20.000.000	PAD
21)	5.04.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Palembang	48 laporan	1.406.190.424	PAD
			<i>listrik</i>			620.000.000	
			<i>air</i>			400.000.000	
			<i>internet</i>			380.190.424	
			<i>telp</i>			6.000.000	
22)	5.04.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - Gaji Non PNS - Satpam - Tutor SKJ - Cleaning Service	Palembang	1 laporan	2.163.330.000 1.024.530.000 310.000.000 18.800.000 810.000.000	PAD
5.	5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemeliharaan BMD	Palembang	100%	2.171.287.000	PAD
23)	5.04.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Palembang	16 unit	391.550.000	PAD
24)	5.04.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Palembang	20 unit	200.000.000	PAD

Nomor	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 050-3708)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
25)	5.04.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Palembang	3 unit	1.379.737.000	PAD
26)	5.04.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Palembang	2 unit	200.000.000	PAD
II.	05.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase tercapainya program pengembangan sumber daya manusia	Palembang	100%	3.965.720.000	PAD
5.	5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Teknis	Palembang	100%	900.000.000	PAD
27)	5.04.02.1.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	jumlah peserta yang mengikuti pengembangan Kompetensi - <i>Bimtek Perencanaan dan Penganggaran</i> - <i>Bimtek peningkatan kapasitas SDM Aparatur Pengantar Manajemen ASN</i> - <i>Bimtek Bendahara Keuangan Daerah</i> - <i>Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah</i> - <i>Bimtek Penyusunan Perda dan Perkada</i>	Palembang	200 orang 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang	900.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000	PAD PAD PAD PAD PAD
5.	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pelaksanaan Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Palembang	100%	3.065.720.000	PAD
28)	5.04.02.1.02.02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/ Kota yang Terkelola dengan Baik	Palembang	1 lembaga	300.000.000	PAD

Nomor	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 050-3708)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
			- Akreditasi diklat - Bimtek Manajemen Kinerja ASN		1 dokumen	150.000.000 150.000.000	PAD PAD
29)	5.04.02.1.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	jumlah Peserta Uji Kompetensi dan Sertifikasi - pelatihan PPK Tipe C - pelatihan dan Ujian sertifikasi Barang Jasa level 1	Palembang	90 orang 30 orang 30 orang	300.000.000 150.000.000 150.000.000	PAD PAD PAD
30)	5.04.02.1.02.04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar - Pelatihan pengembang teknologi pembelajaran - pelatihan tenaga pengelola perpustakaan	Palembang	2 laporan 30 orang 30 orang	300.000.000 150.000.000 150.000.000	PAD PAD PAD
31)	5.04.02.1.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan - Diklat Bendahara sekolah - Diklat kearsipan - Diklat Manajemen Kepegawaian - Diklat peningkatan kompetensi guru - Diklat peningkatan kompetensi tenaga administrasi puskesmas	Palembang	280 orang 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang	2.165.720.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000	PAD PAD PAD PAD PAD

Nomor	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 050-3708)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
			- Diklat peningkatan kompetensi tenaga administrasi sekolah		40 orang	150.000.000	
			- Pelatihan Kepemimpinan Pengawas		40 orang	585.720.000	PAD
			- Pelatihan Kepemimpinan Administrator		40 orang	680.000.000	PAD
		JUMLAH APBD				29.397.147.424	

SUMBER DANA BLUD

		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah		100%	14.000.000.000		
5.	5.04.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase terlaksananya kegiatan pelayanan BLUD		100%	14.000.000.000	lain-lain PAD	
32)	5.04.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan		1 unit	14.000.000.000	lain-lain PAD	
		JUMLAH BLUD				14.000.000.000		
		TOTAL APBD + BLUD					43.397.147.424	

BAB IV

PENUTUP

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur merupakan investasi jangka panjang dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat menuju otonomi daerah.

Untuk membentuk Sumber Daya Aparatur Manusia (SDM) aparatur yang kompetitif dan berkompentensi untu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat diperlukan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) aparatur yang berorientasi pada kebutuhan pemerintah daerah.

Kualitas penyelenggaraan diklat yang demikian hanya dapat direalisasikan apabila didukung oleh komponen-komponen yang memadai, seperti SDM penyelenggara diklat, widyaiswara/ narasumber/ instruktur, sarana/prasarana/ media pembelajaran/alat bantu latihan, mutu program, kurikulum/silabi, serta faktor penunjang lainnya.

Dalam rangka itu maka kami menyusun RENJA Tahun 2025 agar kegiatan kediklatan Tahun 2025 dapat lebih berkualitas, terarah, sistematis dan berkesinambungan. Kami berharap kiranya RENJA ini mendapatkan respon yang positif dari pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.